

Evaluasi Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Dalam Pembentukan Satgas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Perguruan Tinggi (PPKPT)

Ferditya Ilham Permana¹⁾, Chesta Surya Ebertha²⁾, Hendri Maji³⁾, Erwing Wahyu Millensyah⁴⁾

- ¹⁾ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
²⁾ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
³⁾ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
⁴⁾ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

e-mail: ferditya38@gmail.com¹⁾, chestasurya58@gmail.com²⁾, majihendri@gmail.com³⁾, erwing.wahyu.fisip@upnjatim.ac.id⁴⁾.

Received: 04-06-2025

Revised: 15-06-2025

Accepted: 19-06-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Performance Evaluation, PPKPT Task Force, LLDIKTI Region VII, Permendikbudristek No. 55 of 2024, Performance Indicators

The performance of LLDIKTI Region VII is in accordance with Peremndikbudristek No. 55 of 2024 which includes the establishment of a task force for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education in East Java. This study is a study that uses a qualitative method using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. This study uses the theory of Joseph Wholey (1979) using five indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Quality, Satisfaction, and Impact which are included in the performance evaluation theory, so that Performance produces a scientific picture of the performance evaluation of LLDIKTI Region VII in the formation of the PPKPT task force, this study aims to evaluate the performance of LLDIKTI in the formation of the PPKPT task force. The results of the study showed that LLDIKTI Region VII has performed well in the formation of the PPKPT task force in accordance with the performance evaluation indicators. In addition, in terms of performance evaluation conducted by LLDIKTI Region VII with a theoretical approach by Joseph Wholey (1979) with indicators of effectiveness, efficiency, quality, satisfaction, and impact, the performance evaluation conducted by LLDIKTI Region VII can be said to have met the formation target with the majority of PPKPT task forces that have been formed reaching 85%. This finding also shows that the acceleration strategy implemented by LLDIKTI Region VII is collaborative and adaptive, such as compiling pocket books, producing educational content, and organizing direct socialization to universities. Through this participatory approach, there is an increase in institutional responsiveness in forming the PPKPT Task Force. The results of this study not only provide an evaluative picture, but can also be used as a reference in strengthening PPKPT policies nationally in the future, so that it can help LLDIKTI Region VII in providing responsive services and can make it easier for each university under the auspices of LLDIKTI Region VII to conduct evaluations in forming the PPKPT task force.

Kata Kunci:

Evaluasi Kinerja, Satgas PPKPT, LLDIKTI Wilayah VII, Permendikbudristek No 55 Tahun 2024, Indikator kinerja

Abstrak.

Kinerja LLDIKTI Wilayah VII sesuai dengan Peremndikbudristek No 55 Tahun 2024 yang termasuk ke dalam urusan pembentukan satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi di Jawa timur. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Joseph Wholey (1979) dengan menggunakan lima indikator yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kualitas, Kepuasan, dan Dampak yang masuk ke dalam teori evaluasi kinerja, Sehingga menghasilkan suatu gambaran secara ilmiah tentang evaluasi kinerja dari LLDIKTI Wilayah VII dalam pembentukan satgas PPKPT, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja LLDIKTI dalam pembentukan satgas PPKPT. Maka diperoleh hasil penelitian bahwa LLDIKTI Wilayah VII telah melakukan kinerja yang baik dalam pembentukan satgas PPKPT yang sesuai dengan indikator evaluasi kinerja. Selain itu dalam hal evaluasi kinerja yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII dengan pendekatan teori oleh Joseph Wholey (1979) dengan indikator efektivitas, efisiensi, kualitas, kepuasan, dan dampak maka evaluasi kinerja yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII dapat dikatakan telah memenuhi target pembentukan dengan mayoritas satgas PPKPT yang telah terbentuk mencapai 85%. Temuan ini juga menunjukkan bahwa strategi percepatan yang diterapkan oleh LLDIKTI Wilayah VII bersifat kolaboratif dan adaptif, seperti penyusunan buku saku, produksi konten edukatif, serta penyelenggaraan sosialisasi langsung kepada perguruan tinggi. Melalui pendekatan partisipatif ini, tercipta peningkatan responsivitas institusi dalam membentuk Satgas PPKPT. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran evaluatif, tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam penguatan kebijakan PPKPT secara nasional di masa mendatang, sehingga dapat membantu LLDIKTI Wilayah VII dalam memberikan suatu pelayanan secara responsif dan dapat mempermudah setiap perguruan tinggi yang ada dalam naungan LLDIKTI Wilayah VII untuk melakukan evaluasi dalam membentuk satgas PPKPT.

A. PENDAHULUAN

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memegang peranan penting dalam mengawasi dan mendorong pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024. Sebagai pemangku kepentingan utama, LLDIKTI khususnya LLDIKTI wilayah VII atau Jawa Timur bertanggung jawab memastikan bahwa setiap perguruan tinggi di wilayah kerjanya membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPKPT yang berfungsi secara efektif dalam menangani berbagai kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam menjalankan tugas tersebut, LLDIKTI memiliki sejumlah kewajiban meliputi penyusunan pedoman bagi Satgas, pelaksanaan sosialisasi kebijakan, serta penyelenggaraan pelatihan bagi anggota Satgas agar mereka mampu melaksanakan peran dan tanggung jawab secara optimal. Upaya ini bertujuan memperkuat kapasitas Satgas dalam menerima, memproses, dan menangani laporan kekerasan, sekaligus memberikan pendampingan bagi korban.¹ Selain itu, LLDIKTI juga berperan memfasilitasi kerjasama antara perguruan tinggi dan lembaga penegak hukum guna mempercepat penanganan

¹ Sinuraya, A. M., Asbari, M., & Angin, S. H. B. P. (2024). Tantangan dan Inovasi: Evaluasi Pendidikan Masa Depan. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(4), 26-29.

kasus kekerasan. Tidak hanya terbatas pada aspek hukum, LLDIKTI turut mendukung program edukasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai langkah preventif untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan aman bagi seluruh sivitas akademika.²

Proses pembentukan dan implementasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) di bawah pengawasan LLDIKTI Wilayah VII menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman beberapa perguruan tinggi terkait urgensi pembentukan Satgas, baik dari aspek regulasi maupun teknis pelaksanaannya. Beberapa perguruan tinggi juga mengalami hambatan dalam merekrut anggota Satgas yang memiliki kompetensi memadai, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual dan melindungi korban. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun sarana penunjang, turut menghambat proses implementasi kebijakan ini. Koordinasi antara perguruan tinggi, LLDIKTI, dan lembaga terkait pun menjadi tantangan tersendiri terutama dalam mempercepat respons terhadap laporan kasus kekerasan³. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas peran LLDIKTI, mulai dari penyebarluasan kebijakan, fasilitasi pembentukan Satgas, hingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKPT di perguruan tinggi. Melalui evaluasi berbagai kendala yang muncul dapat diidentifikasi, serta solusi yang tepat dapat dirumuskan agar Satgas mampu berfungsi secara optimal. Dengan demikian, evaluasi kinerja LLDIKTI tidak hanya memastikan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini juga menggunakan beberapa teori yang relevan dengan urgensi dalam melakukan pembentukan satgas PPKPT yakni dengan menggunakan teori kebijakan publik, teori kekerasan, teori kinerja, dan juga menggunakan teori evaluasi kinerja. Teori tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi tentang penelitian mengenai evaluasi kinerja oleh LLDIKTI Wilayah VII dalam pembentukan satgas PPKPT.⁴

Peraturan mengenai kekerasan tersebut telah tercantum pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT), dalam Permendikbudristek tersebut setiap perguruan tinggi wajib memiliki satgas

² Ni Putu Rai Yuliantini, Anak Agung Istri Atu Dewi, and Ni Ketut Supasti Darmawan, 'Implementation of Convention on The Rights of Persons with Disabilities in Providing Legal Protection for Persons with Disabilities in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6.1 (2021), p. 129, doi:10.17977/um019v6i1p129-137.

³ Elizabeth Grace Simanjuntak and M Falikul Isbah, "'The New Oasis': Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi", *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11.3 (2022), pp. 537–55, doi:10.20961/jas.v11i3.59736.

⁴ Arnas, Y., Arti, E. S., & Kalbuana, N. (2024). Analisis Five Forces Porter dalam Evaluasi Produktivitas Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi Kedinasan. *Journal of Education Research*, 5(1), 158-169.

(satuan tugas) yang berfungsi untuk menangani serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang berada pada lingkungan Perguruan tinggi, di dalam Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 juga telah dijelaskan tentang cakupan enam bentuk tindakan kekerasan, mekanisme pembentukan satuan tugas PPKPT, serta bantuan terhadap korban kekerasan. Oleh karena itu penting bagi setiap perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas PPKPT agar peran penting dari satuan tugas tersebut dapat memberikan rasa aman pada setiap anggota Perguruan tinggi baik dari aspek Mahasiswa, Tenaga Pendidik, Dosen, dan Staf lainnya yang berada pada lingkungan Perguruan tinggi berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan adanya Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 maka cakupan pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan terbagi menjadi enam bentuk kekerasan, yaitu : Kekerasan psikis, Kekerasan fisik, Kekerasan seksual, Intoleransi, Diskriminasi, dan Kebijakan yang mengandung kekerasan. Keenam bentuk tindakan kekerasan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan dari yang sebelumnya, yaitu Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 yang hanya mencakup pada Kekerasan Seksual. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 dapat lebih membantu satuan tugas PPKPT di masing-masing perguruan tinggi untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.⁵

Sehingga untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut pemerintah pusat memberikan kewenangan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII (LLDIKTI) untuk berupaya dalam memberikan pemahaman bagi perguruan tinggi yang berada dalam naungan LLDIKTI Wilayah VII atau wilayah Jawa timur, dalam hal ini LLDIKTI Wilayah VII bertugas untuk mengarahkan setiap perguruan tinggi agar membentuk satuan tugas PPKPT sesuai dengan arahan Pemerintah pusat dan mengikuti peraturan Permendikbudristek No 55 Tahun 2024.⁶ Di dalam peraturan tersebut telah tertulis pada pasal 101 bahwa “Pemimpin Perguruan Tinggi yang belum membentuk satuan tugas wajib membentuk satuan tugas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan.” Dengan begitu pengesahan Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 pada bulan Oktober 2024 akan mencapai batas akhir pembentukan satuan tugas pada bulan April 2025, namun sampai dengan saat ini melalui data dari tim kerja bidang Akademik dan Riset Pengembangan LLDIKTI Wilayah VII telah tercatat sebanyak 229 perguruan tinggi di wilayah Jawa timur telah membentuk satgas PPKPT dan sebanyak 82 perguruan tinggi yang belum membentuk satuan tugas PPKPT, hal ini yang mendasari bahwa evaluasi kinerja LLDIKTI

⁵ Suprpto, S. (2019). Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Edukasi*, 17(1), 294414.

⁶ Nugroho, B. H., & Hasibuan, S. EVALUASI PENDIDIKAN DARING DI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SELAMA PANDEMI COVID-19: SEBUAH KAJIAN PUSTAKA.

Wilayah VII dalam melakukan pembentukan satgas PPKPT perlu untuk dilakukan, untuk menilai kinerja dari LLDIKTI Wilayah VII dalam melakukan pembentukan satgas PPKPT⁷.

Melalui data tersebut telah diketahui sebanyak 82 Perguruan tinggi di wilayah Jawa timur masih belum membentuk satuan tugas PPKPT, selain itu melalui hasil wawancara oleh penanggung jawab bidang Akademik dan Riset Pengembangan bapak Kadek Anggi Sastra Pramana mengatakan bahwa “dalam hal pembentukan satuan tugas PPKPT terdapat kendala bagi perguruan tinggi yang masih belum membentuk karena sumber daya yang tidak memadai, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, serta kurangnya responsivitas dari para karyawan atau staf yang bekerja pada instansi tersebut.” Oleh karena itu, dari berbagai masalah yang dialami oleh LLDIKTI Wilayah VII dalam mengarahkan perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas PPKPT menjadi landasan utama penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja LLDIKTI Wilayah VII dalam mengatasi masalah tersebut. Pemerintah pusat melalui LLDIKTI Wilayah VII sangat menghimbau bahwa seluruh perguruan tinggi dapat membentuk satuan tugas PPKPT, sehingga menciptakan kondisi lingkungan kampus yang aman dan terkendali dari ancaman tindak kekerasan. Selain itu pihak satuan tugas tidak hanya bertugas untuk menangani tetapi juga bertugas untuk mencegah melalui penyampaian edukasi mengenai kekerasan, mengajak masyarakat terutama dalam lingkungan kampus agar selalu melakukan tindakan yang positif dan produktif untuk kebaikan bersama.

Menurut (Saputra, 2025), dalam penelitian yang berjudul “Strategi Kampanye Karya Magang Kinarya Dalam Meningkatkan Kesadaran Perguruan Tinggi Pada Isu Kekerasan Seksual” LLDIKTI Wilayah VII memiliki peran strategis dalam pembentukan satuan tugas PPKPT dengan menerapkan strategi komunikasi publik berdasarkan model *Public Information*. Meskipun inisiatif tersebut telah memberikan dampak positif, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar institusi serta keseragaman pesan yang disampaikan. Temuan ini relevan dengan penelitian ini, karena membahas mengenai strategi kampanye program oleh LLDIKTI Wilayah VII dalam mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan implementasi satuan tugas PPKPT di berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur.⁸

Dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan ODGJ dan Penanganan Disabilitas” menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum Dinas Sosial Kota Batu telah melaksanakan kinerja dalam

⁷ Leylia Khairani and Widya Masitah, ‘Mewujudkan Perguruan Tinggi Bebas Dari Pelecehan Dan Kekerasan Seksual’, 2021, pp. 66–78.

⁸ Syuhadak, S., & Hilmi, D. (2020). Pembelajaran Bahasa Arab ditinjau dalam perspektif studi multikultural di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Jawa Timur.

pembinaan ODGJ orang dalam gangguan jiwa dan juga penanganan Disabilitas Kota Batu dengan penuh upaya dan tercapainya program-program melalui tinjauan dari segi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hasil ini relevan dengan penelitian ini, karena membahas evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program oleh pemerintah daerah.⁹

(Sitorus, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Dairi” dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan fakta yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan untuk mengetahui kinerja LLDIKTI Wilayah VII dalam membentuk satuan tugas PPKPT, penelitian ini merujuk pada teori Evaluasi kinerja oleh Joseph Wholey (1979) dengan beberapa indikator teori antara lain Efektivitas, Efisiensi, Kualitas, Kepuasan, dan Dampak. Teori Evaluasi kinerja tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kelima fungsi evaluasi tersebut dapat menilai kinerja LLDIKTI Wilayah VII dalam proses pembentukan serta operasionalisasi Satgas PPKPT.¹⁰ Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai Teori Kekerasan dari Johan Galtung (1996) yang membagi aspek kekerasan menjadi tiga yaitu kekerasan secara langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Selain itu, terdapat juga Teori Kebijakan dari David Easton (1965), dan Teori Kinerja menurut Hasibuan (2012) yang berdasar kepada kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu dalam mengerjakan untuk memperoleh hasil dari kebijakan yang positif dalam pembentukan Satgas PPKPT dalam naungan LLDIKTI Wilayah VII Jawa timur.¹¹

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian yang sudah dijelaskan, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif yang merupakan suatu metode untuk melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan (Septiani & Wardana, 2022) . Penelitian kualitatif adalah studi yang berfokus pada kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai materi. Dengan kata lain, penelitian ini lebih menitikberatkan pada deskripsi menyeluruh yang dapat menggambarkan secara rinci suatu kegiatan atau situasi yang sedang terjadi, daripada sekadar membandingkan dampak suatu perlakuan tertentu atau

⁹ Wholey, J. S. (1979). *Evaluation: Promise and Performance*. Washington, D.C.: The Urban Institute.

¹⁰ Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 171-183.

¹¹ Kamilia, F. F. S. K., & Wahyudin, D. (2021). Evaluasi pembelajaran berbasis e-learning pada jenjang pendidikan tinggi. *Inovasi Kurikulum*, 18(2), 222-230.

menjelaskan sikap serta perilaku individu (Fadli, 2021) Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai informasi yang mendukung keberhasilan penelitian. Dengan demikian, dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja LLDIKTI Wilayah VII dalam pembentukan Satgas (PPKPT), guna menilai apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Fokus penelitian ini adalah Evaluasi Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Dalam Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) di wilayah Jawa Timur. Selain itu, evaluasi kinerja berdasarkan teori evaluasi kinerja oleh Jhosep Wholey (1979) yang memiliki 5 indikator utama antara lain: Efektivitas, Efisiensi, Kualitas, Kepuasan, dan Dampak. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor LLDIKTI Wilayah VII Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.177, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan kemudahan akses data terkait informasi, dokumen, dan narasumber. Selain itu alasan peneliti untuk memilih LLDIKTI Wilayah VII dikarenakan pada LLDIKTI Wilayah VII terdapat Perguruan Tinggi yang telah berhasil membentuk Satgas PPKPT serta LLDIKTI Wilayah VII merupakan lembaga yang menaungi seluruh Perguruan Tinggi di Wilayah Jawa timur, dan kami juga bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan UPN Veteran Jawa Timur dalam hal pembentukan satgas PPKPT oleh ketua satgas Ibu Irmasanti Danadharta dari Universitas 17 Agustus 1945 dan Bapak Singgih Manggalou dari UPN Veteran Jawa Timur, data tersebut kami dapatkan atas rekomendasi dari Bapak Kadek Anggi Sastra Pramana selaku penanggung jawab bidang *Junior Program Officer* Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (JPOPPKS).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik Wawancara yaitu adanya dua belah pihak yang melakukan komunikasi tatap muka pihak satu sebagai interviewer dan pihak lain sebagai interviewee yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang valid (Trivaika & Senubekti, 2022). Interviewer atau peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada interviewee atau responden untuk memperoleh jawaban yang diperlukan (Fadhallah, 2020). Selain wawancara penelitian ini juga membutuhkan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, dokumentasi adalah metode memperoleh data mengenai hal-hal pada penelitian yang dapat berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental yang memberikan data atau informasi pada saat penelitian berlangsung (Farah & Luthflyah, 2017). Adanya metode dokumentasi digunakan sebagai pendukung informasi - informasi yang telah diperoleh dari hasil interview atau wawancara. Selain itu dalam mengumpulkan informasi yang relevan, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi. Menurut Adler & Adler (1987) dalam jurnal menyatakan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia (Hasanah, 2017).

Sumber data dalam penelitian merujuk pada segala bentuk informasi terkait data - data serta dokumen yang diperlukan dalam proses penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian kali ini diperoleh dari hasil wawancara, serta dalam menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan masih adanya keterkaitan antara informan dengan okus penelitian yang akan diteliti (Hamed & Anshori, 2022). Teknik *purposive sampling* adalah teknik Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau persyaratan yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga dalam proses pengambilan sampel tersebut tidak dilakukan secara acak melainkan dengan sengaja mengambil sampel tertentu yang memiliki karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat khusus yang relevan dengan tujuan penelitian (Nasution, 2023). Pada penelitian ini yang menjadi informan ialah Staff LLDIKTI Wilayah VII di bidang Akademik dan Riset Pengembangan.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung berupa arsip, laporan, ataupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan secara terstruktur yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:20) bahwa teknik analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan sistematis untuk merujuk pada pokok pembahasan yang lebih terstruktur dan relevan (Rijali, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan teori Evaluasi Kinerja yang dikemukakan oleh Joseph Wholey (1979) serta mengikuti seluruh indikator yang mendukung teori Evaluasi Kinerja tersebut antara lain : faktor efektifitas, faktor efisiensi, faktor kualitas, faktor kepuasan, dan faktor dampak. Kelima indikator tersebut akan dihubungkan dengan program serta tindakan atau langkah yang diambil oleh LLDIKTI Wilayah VII dalam membentuk Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk mengukur kinerja dan keseriusan LLDIKTI Wilayah VII dalam membentuk Satgas PPKPT. ¹²Dengan begitu akan tercipta transparansi dan

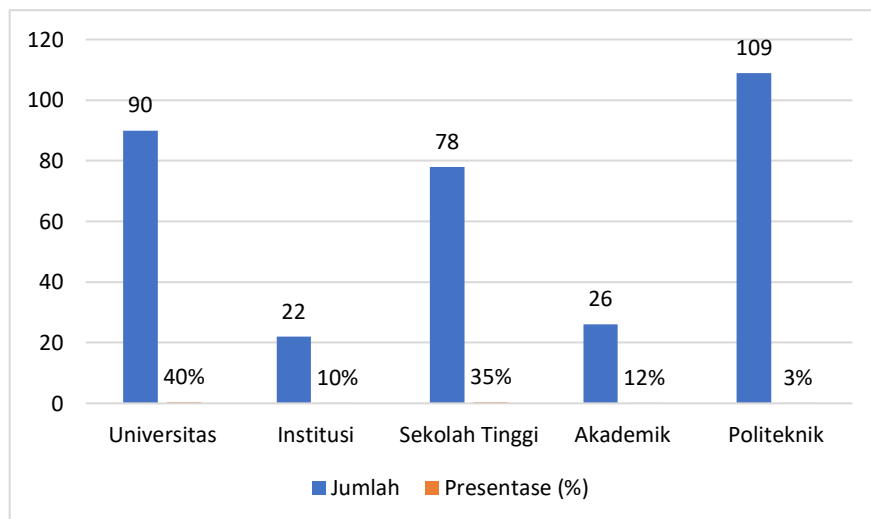
¹² Khairani, Leylia, and Widya Masitah, 'Mewujudkan Perguruan Tinggi Bebas Dari Pelecehan Dan Kekerasan Seksual', 2021, pp. 66–78

dapat dijadikan bahan evaluasi internal untuk membangun serta memperbaiki setiap kekurangan yang ada.

C. 1 Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Kadek Anggi Sastra Pramana selaku Penanggung jawab bidang Junior Program Officer Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (JPOPPKS) sekaligus Staf Akademik dan Riset Pengembangan di LLDIKTI Wilayah VII, diperoleh data bahwa hingga 31 Desember 2024, terdapat 226 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan LLDIKTI Wilayah VII yang telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT). Jumlah ini mencerminkan keberhasilan implementasi program percepatan pembentukan Satgas PPKPT yang telah disosialisasikan sejak awal periode pelaksanaan. Jenis perguruan tinggi yang paling mendominasi dalam pembentukan Satgas PPKPT adalah Universitas, dengan persentase mencapai 40% dari total PTS yang telah membentuk satgas. Di sisi lain, masih terdapat 41 PTS yang belum membentuk Satgas PPKPT. Dari jumlah tersebut, jenis perguruan tinggi yang paling banyak belum membentuk satgas adalah Sekolah Tinggi,¹³ dengan jumlah sebanyak 13 institusi atau sekitar 31% dari total PTS yang belum membentuk satgas.

Tabel. 1



Sumber: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII 2024

¹³ Yuliantini, Ni Putu Rai, Anak Agung Istri Atu Dewi, and Ni Ketut Supasti Darmawan,

Selain membahas mengenai target pembentukan LLDIKTI Wilayah VII juga memiliki cara atau strategi percepatan pembentukan Satgas PPKPT yang dirancang secara sistematis dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pendekatan, baik berbasis data, literasi, edukasi, maupun komunikasi langsung. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Kadek Anggi Sastra Pramana selaku penanggung jawab bidang Junior Program Officer Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (JPOPPKS), terdapat empat strategi utama yang dijalankan.

Pertama, LLDIKTI Wilayah VII melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah kerjanya. Pendataan ini bertujuan untuk memetakan kondisi awal serta memastikan seluruh PTS yang berjumlah 267 institusi berada dalam cakupan koordinasi pembentukan Satgas PPKPT. Pendekatan berbasis data ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemantauan progres pelaksanaan kebijakan. Kedua, LLDIKTI Wilayah VII menyusun dan menerbitkan buku saku berjudul “Praktik Baik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Buku ini dikembangkan oleh tim yang terbagi ke dalam dua bidang, yakni copywriting dan desain visual, sebagai bentuk inovasi dalam penyampaian informasi yang komprehensif dan menarik. Buku tersebut bertujuan untuk memberikan panduan praktis sekaligus inspiratif bagi perguruan tinggi dalam membentuk dan mengelola Satgas PPKPT secara efektif.¹⁴

Ketiga, LLDIKTI memproduksi konten edukatif dalam bentuk “video series” Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Terdapat tiga seri video yang dikembangkan secara berurutan, dimulai dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan kronologi kasus yang umum terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Seri kedua membahas dampak psikologis dan sosial terhadap korban kekerasan seksual, sementara seri ketiga secara khusus menjelaskan peran dan struktur Satgas PPKPT sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024. Produksi video ini merupakan hasil kolaborasi antara tim JPOPPKS dan Divisi Humas LLDIKTI Wilayah VII, serta ditujukan untuk meningkatkan literasi masyarakat kampus secara visual dan naratif. Keempat, strategi yang paling langsung dan berdampak adalah penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tatap muka yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024. Dalam kegiatan ini, lebih dari 200 perwakilan dari perguruan tinggi, baik ketua satgas

¹⁴ Simanjuntak, Elizabeth Grace, and M Falikul Isbah, “The New Oasis”: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11.3 (2022), pp. 537–55, doi:10.20961/jas.v11i3.59736

maupun pihak yang ditugaskan, hadir dan mengikuti rangkaian diskusi serta konsultasi. Tidak hanya menjadi media penyampaian informasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan oleh LLDIKTI Wilayah VII untuk memberikan asistensi teknis secara langsung kepada perguruan tinggi yang masih mengalami kendala dalam proses pembentukan satgas. Pendekatan komunikasi dua arah ini dinilai efektif dalam mempercepat proses adaptasi dan implementasi regulasi di masing-masing institusi.¹⁵

Dengan kombinasi antara pendekatan berbasis data, penyediaan literatur praktis, produksi konten edukatif, dan komunikasi langsung, strategi percepatan pembentukan Satgas PPKPT yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VII menunjukkan keseriusan serta inovasi kelembagaan dalam mendorong implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 secara luas dan berkelanjutan. Dan pendekatan teori yang digunakan menurut Joseph Wholey (1979) pada faktor efektivitas terhadap pembentukan Satgas PPKPT di LLDIKTI Wilayah VII tergolong efektif, dikarenakan LLDIKTI Wilayah VII memiliki beberapa strategi yang digunakan dalam membentuk satgas PPKPT dengan cepat dan efektif.

C.2 Efisiensi

Efisiensi menurut Sedarmayanti (2017) merupakan tindakan yang menunjukkan daya guna tidak hanya hasilnya saja, tetapi juga ditekankan pada daya atau usaha atau pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut, agar tidak terjadi pemborosan (Patentius, 2022). Oleh karena itu dapat didefinisikan bahwa efisiensi tidak hanya berfokus pada hasil yang diperoleh, tetapi juga mementingkan daya guna atau kinerja dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam menjalankan suatu tujuan tertentu untuk menghindari terjadinya pemborosan anggaran. Begitu juga yang telah dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII dalam melakukan pendampingan terhadap masing – masing perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur agar dapat dengan mudah untuk membentuk Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, selain itu LLDIKTI Wilayah VII juga memaksimalkan peran dari rekan rekan magang Kinarya untuk membantu dalam melakukan pendampingan sampai perguruan tinggi tersebut berhasil membentuk SK Satgas terbaru yakni SK Satgas PPKPT.

¹⁵ 'Implementation of Convention on The Rights of Persons with Disabilities in Providing Legal Protection for Persons with Disabilities in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6.1 (2021), p. 129, doi:10.17977/um019v6i1p129-137

Dari wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Kadek Anggi Sastra Pramana selaku penanggung jawab bidang *Junior Program Officer* Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (JPOPPKS) yang juga sekaligus menjabat sebagai staff Akademik dan Riset Pengembangan, menjelaskan mengenai pentingnya peran dari rekan – rekan magang Kinarya untuk membantu LLDIKTI Wilayah VII dalam membentuk satgas PPKPT yang sesuai dengan amanat Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 dan tentunya juga sangat membantu sekali dalam hal efisiensi anggaran. Selain itu Kinerja dari rekan – rekan JPOPPKS juga sangat baik, tercatat dalam 3 bulan dari pengesahan Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 di sahkan telah terdaftar sebanyak 226 Perguruan tinggi Swasta yang telah memiliki SK Satgas PPKPT.¹⁶

Tabel. 2

No	Jenis Perguruan Tinggi	Jumlah	Presentase
1	Universitas	90	40 %
2	Institut	22	10 %
3	Sekolah Tinggi	78	35 %
4	Akademi	26	12 %
5	Politeknik	10	3 %
Jumlah		226	100 %

Sumber : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII 2024

Jumlah Perguruan Tinggi Swasta Bersatgas PPKPT

Data tersebut merupakan presentase dari seluruh perguruan tinggi swasta di dalam naungan LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur yang telah berhasil membentuk satgas PPKPT dari hasil kerjasama para rekan – rekan JPOPPKS dalam 3 bulan bekerja. Dengan kata lain kinerja rekan – rekan dari JPOPPKS juga diperitungkan selain dari hasil yang telah didapatkan. Sebagai sebuah perbandingan, bahwa terdapat 267 Perguruan Tinggi Swasta yang terdaftar dalam naungan LLDIKTI Wilayah VII, data tersebut dapat dilihat pada tabel

¹⁶ Toriqularif, M. (2019). Penelitian evaluasi pendidikan. *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 66-76.

di bawah ini yang menunjukkan total keseluruhan Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Jawa Timur.¹⁷

Tabel. 3

No	Jenis Perguruan Tinggi	Jumlah	Presentase
1	Universitas	102	38 %
2	Institut	29	11 %
3	Sekolah Tinggi	91	34 %
4	Akademi	32	12 %
5	Politeknik	13	5 %
Jumlah		267	100 %

Sumber : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII 2024

Jumlah Perguruan tinggi swasta dalam naungan LLDIKTI Wilayah VII

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari total keseluruhan Perguruan Tinggi Swasta yang terdaftar dalam naungan LLDIKTI Wilayah VII dibandingkan dengan presentase keberhasilan Perguruan Tinggi yang telah membentuk satgas PPKPT yakni sebesar 85% dari jumlah total keseluruhan Perguruan Tinggi. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang baik bagi LLDIKTI Wilayah VII melalui bidang JPOPPKS serta bidang Akademik dan Riset Pengembangan untuk terus menyeimbangkan kinerja dan hasil yang telah diraih. Namun LLDIKTI Wilayah VII juga harus memperhatikan target yang telah tertera pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 bahwa dalam bulan April 2025 seluruh perguruan tinggi harus berhasil membentuk satgas PPKPT.¹⁸

Dalam teori evaluasi kinerja, Joseph Wholey (1979) menyatakan bahwa “kualitas” adalah bagian dari evaluasi berbasis hasil (*results-based evaluation*), yang mencakup sejauh mana suatu program atau layanan memenuhi standar yang telah ditetapkan, apakah layanan tersebut responsif terhadap kebutuhan pengguna dan apakah pelaksanaannya dilakukan

¹⁷ Yusuf, A. M. (2017). *Asesmen dan evaluasi pendidikan*. Prenada Media.

¹⁸ Arikunto, S. (2021). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi 3*. Bumi aksara.

dengan prosedur yang benar, akurat, dan konsisten. Kualitas layanan LLDIKTI dalam pembentukan Satgas PPKPT dapat dinilai tinggi karena pendampingan yang diberikan seperti sosialisasi, pendampingan teknis, pengarsipan SK Satgas, dan pelatihan langsung. Hal tersebut relevan dengan kebutuhan faktual perguruan tinggi dan sejalan dengan prinsip menekankan pentingnya program yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan. Dalam wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Kadek Anggi Sastra Pramana menjelaskan bahwa LLDIKTI merespons cepat perubahan regulasi dari PPKS ke PPKPT berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 dengan menyesuaikan materi sosialisasi, template Surat Keputusan, dan pendataan. Hal ini mencerminkan kualitas dinamis dan adaptif LLDIKTI memberikan buku panduan, formulir, hingga platform pelaporan daring, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dilakukan sesuai prosedur standar. hal ini mencerminkan indikator kualitas dari Wholey yakni kesesuaian dengan prosedur dan standar kinerja.¹⁹

Tabel. 4

No	Jenis Perguruan Tinggi	Jumlah	Presentase
1	Universitas	90	40 %
2	Institut	22	10 %
3	Sekolah Tinggi	78	35 %
4	Akademi	26	12 %
5	Politeknik	10	3 %
Jumlah		226	100 %

Sumber : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII 2024

Jumlah Perguruan tinggi Bersatgas PPKPT LLDIKTI Wilayah VII

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa hingga 31 Desember 2024, sebanyak 226 Perguruan Tinggi telah membentuk satuan tugas PPKPT sejak dimulainya periode

¹⁹ Raharjo, S. B. (2012). Evaluasi trend kualitas pendidikan di indonesia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 511-532.

sosialisasi. Jenis perguruan tinggi yang paling banyak membentuk satgas adalah Universitas, dengan persentase mencapai 40%.²⁰

Tabel. 5

No	Jenis Perguruan Tinggi	Jumlah	Presentase
1	Universitas	12	30 %
2	Institut	7	17 %
3	Sekolah Tinggi	13	31 %
4	Akademi	6	15 %
5	Politeknik	3	7 %
Jumlah		41	100 %

Sumber : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII 2024

Jumlah Perguruan Tinggi Belum Bersatgas PPKPT LLDIKTI Wilayah VII

Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 41 Perguruan Tinggi yang belum membentuk satgas PPKPT, dengan proporsi tertinggi berasal dari jenis Perguruan Tinggi “Sekolah Tinggi”, yakni sebanyak 13 institusi di Jawa Timur atau sekitar 31%. Namun, apabila dibandingkan dengan target pembentukan satgas PPKPT yang ditetapkan oleh LLDIKTI Wilayah VII hingga 31 Desember 2024, yaitu sebesar 50% dari total Perguruan Tinggi Swasta, maka target tersebut telah terlampaui. Sebanyak 226 Perguruan Tinggi Swasta, atau setara dengan 85% (Sumber LLDIKTI Wilayah VII 2024) telah membentuk satgas PPKPT. Hal ini menunjukkan bahwa strategi percepatan pembentukan satgas yang dijalankan oleh LLDIKTI Wilayah VII berhasil dilaksanakan dengan baik. Capaian pembentukan satgas sebesar 85% (Sumber LLDIKTI Wilayah VII 2024) dalam kurun waktu tiga minggu mencerminkan bahwa layanan LLDIKTI sangat efisien dalam membentuk satgas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan tentunya dengan strategi pembentukan Satgas yang cukup memudahkan bagi perguruan tinggi untuk segera membentuk satgas PPKPT, Sekaligus mampu melampaui target yang telah ditetapkan.²¹

²⁰ Wijaya, C. A. (2018). Sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan program studi di institusi pendidikan tinggi. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(1), 13-24.

²¹ Sutariah, F. (2017). Evaluasi Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pendidikan Lembaga Pendidikan Tinggi ABC di Cikarang. *STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi)*, 2(1), 38-47.

C. 3 Kualitas

Kepuasan pengguna layanan atau *stakeholder satisfaction*, yang mencerminkan sejauh mana program atau kebijakan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pihak yang dilayani (Wholey, 1979). Perguruan tinggi merupakan pengguna layanan utama dari program pembentukan Satgas PPKPT yang digagas LLDIKTI Wilayah VII. Tingkat kepuasan perguruan tinggi terhadap kebijakan ini dapat dilihat dari tingginya partisipasi mereka. Dari total 267 perguruan tinggi swasta, sebanyak 226 atau sekitar 85% (Sumber LLDIKTI Wilayah VII 2024) telah membentuk Satgas PPKPT hingga akhir Desember 2024, melampaui target internal LLDIKTI sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mendapatkan penerimaan yang baik serta memenuhi ekspektasi mayoritas perguruan tinggi, yang menjadi indikator keberhasilan dari sisi *user satisfaction*. LLDIKTI Wilayah VII juga memberikan berbagai bentuk dukungan teknis seperti penyusunan buku saku, konten video edukatif, dan layanan konsultasi langsung yang memperkuat persepsi positif terhadap lembaga. Melalui kesempatan wawancara yang telah dilakukan terhadap ketua satgas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yakni Ibu Irma, bahwa perguruan tinggi di dalam naungan LLDIKTI Wilayah VII merespon dengan baik terhadap upaya pembentukan satgas PPKPT yang telah ditetapkan pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024, selain itu Ibu Irma juga mengatakan bahwa pembentukan satgas PPKPT dapat membantu satgas agar lebih responsif terhadap masalah kekerasan yang terjadi pada lingkungan Perguruan tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa respon perguruan tinggi terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk satgas PPKPT yang sesuai dengan amanat Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 diterima oleh seluruh Perguruan Tinggi dalam naungan LLDIKTI Wilayah VII, sehingga seluruh mitra perguruan tinggi sangat mendukung dengan adanya pembentukan satgas PPKPT.²²

C.4 Kepuasan

LLDIKTI secara aktif membuka ruang konsultasi tatap muka dan menyediakan bahan sosialisasi tambahan seperti buku saku praktik baik dan video edukatif. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari penyesuaian strategi implementasi berdasarkan evaluasi lapangan, yang sesuai dengan prinsip kinerja adaptif dalam teori Wholey (1979). Selain itu,

²² Siregar, F. G., Saefullah, A., Candra, H., Fadli, A., & Pardian, R. (2024). Evaluasi Penerapan ISAK 35 Terhadap Laporan Keuangan Di Pendidikan Tinggi: Studi Kasus STIE Ganesha. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3067-3079.

LLDIKTI juga memfasilitasi komunikasi dua arah yang konstruktif antara lembaga dan perguruan tinggi, baik secara daring maupun luring, guna memastikan bahwa proses pembentukan Satgas PPKPT tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga dipahami secara substantif oleh seluruh civitas akademika. Keberhasilan LLDIKTI dalam menerima dan menindaklanjuti *feedback* ini menjadi bagian penting dari indikator kepuasan layanan publik, di mana lembaga tidak hanya fokus pada target kuantitatif, tetapi juga memastikan kualitas interaksi dan keberlanjutan kebijakan. Dengan demikian, berdasarkan indikator kepuasan dari teori Wholey (1979), dapat disimpulkan bahwa LLDIKTI Wilayah VII telah menunjukkan kinerja yang sangat positif dalam pembentukan Satgas PPKPT. Selain itu melalui sesi wawancara dengan ketua satgas UPN Veteran Jawa timur Bapak Singgih Manggalau menyatakan bahwa kinerja LLDIKTI Wilayah VII telah melakukan kinerja dengan baik dalam membantu perguruan tinggi dalam membentuk satgas PPKPT,²³ dan bapak singgih manggalau juga turut mengapresiasi keberhasilan LLDIKTI Wilayah VII dalam membentuk satgas PPKPT dengan presentase keberhasilan pembentukan satgas mencapai 85% (Sumber LLDIKTI Wilayah VII 2024) dalam waktu kurang dari tiga minggu, serta respons yang aktif terhadap *feedback* dari perguruan tinggi,²⁴ mencerminkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan yang tinggi dan keberhasilan lembaga dalam mengelola proses dan hasil program secara efektif. Namun Bapak Singgih Manggalou juga sedikit menambahkan bahwa sebaiknya LLDIKTI Wilayah VII juga dapat lebih berkontribusi aktif terhadap perguruan tinggi negeri dalam naungannya tentunya dalam hal pelatihan dan tidak hanya dalam hal administratif saja. Namun secara keseluruhan dalam hal *feedback* LLDIKTI Wilayah VII sangat responsif dalam menerima saran atau masukan dari mitra perguruan tinggi dalam naungan LLDIKTI Wilayah VII.²⁵

C.5 Dampak

Pembentukan satgas PPKPT tentunya memberikan suatu dampak dan perubahan kebiasaan baru dalam menjawab tantangan kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi, mulai dari bernama satgas PPKS yang berfokus pada satu bentuk kekerasan hingga berubah menjadi satgas PPKPT yang berfokus pada enam bentuk tindakan kekerasan. Dalam hal ini teori evaluasi kinerja yang diusung oleh Joseph Wholey (1979) memiliki indikator

²³ Darmadji, A. (2014). Ranah Afektif Dalam Evaluasi Pendidikan Agama Islam, Penting Tapi Sering Terabaikan. *El-Tarbawi*, 8(1), 13-25.

²⁴ Butarbutar, V. M. D., & Ismanto, B. (2022). Evaluasi Pemasaran Jasa Pendidikan Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Perguruan Tinggi. *Mimbar Ilmu*, 27(3), 485-492.

²⁵ Rifky, S. (2024). Dampak penggunaan artificial intelligence bagi pendidikan tinggi. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 2(1), 37-42.

evaluasi yang merujuk pada dampak yang diberikan atau yang dihasilkan dari suatu program kerja serta perubahan kebijakan,²⁶ sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dampak pembentukan satgas PPKPT ditujukan untuk lebih memperhatikan potensi tindakan kekerasan yang lain, oleh karena itu penambahan menjadi enam bentuk kekerasan ini sebagai upaya pemerintah dalam menjawab tantangan kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi.²⁷

Selain itu, dalam acara Rapat Koordinasi Kampus Merdeka Dari Kekerasan di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII yang diselenggarakan di ruang Harsono pada tanggal 7 Oktober 2024, LLDIKTI Wilayah VII menghadirkan pembicara dari Komisioner Komnas Perempuan yakni Bapak Veryanto Sitohang dan juga Ibu Riza Wahyuni yang menjabat sebagai Prkatisi Psikologi Klinis dan Forensik LPP GEOFIRA turut untuk memberikan tanggapannya terhadap pembentukan satgas PPKPT tersebut, beliau berpendapat bahwa tentunya pembentukan satgas PPKPT harus terus didukung dan dimaksimalkan karena sangat berdampak baik bagi seluruh civitas akademika dan para warga kampus agar lebih nyaman dan aman dalam bekerja ataupun sedang mengampu pendidikan. Sehingga dengan begitu dapat diketahui bahwa urgensi dalam pembentukan satgas PPKPT sangat penting dan harus segera dilaksanakan dan dibentuk,²⁸ LLDIKTI Wilayah VII sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan para mitra perguruan tinggi yang ada di wilayah Jawa timur dapat dengan segera dan bersama – sama dalam membentuk satgas PPKPT untuk kepentingan bersama. Yang tentunya akan berdampak positif bagi keberlangsungan proses belajar mengajar di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai upaya untuk menciptakan kampus aman bebas dari kekerasan. Namun dari hasil wawancara penulis dengan ketua satgas perguruan tinggi UPN Veteran Jawa timur melalui ketua satgas Bapak Singgih Manggalou bahwa dampak yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah VII hanya ada dalam hal administratif.²⁹

Melalui beberapa indikator evaluasi kinerja yang dikemukakan oleh Joseph Wholey (1979) dan dihubungkan dengan masalah evaluasi kinerja LLDIKTI Wilayah VII dalam pembentukan satgas PPKPT dapat dijabarkan pada setiap indikator bahwa, pada indikator

²⁶ Martono, S. (2021). Evaluasi Mutu Layanan Pendidikan Tinggi (Studi Pada Program Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana). *Jurnal: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan* ISSN.

²⁷ Yulisma, L., Sukri, S., Aida, D. N., Rosmaladewi, O., & Hanafiah, N. (2023). Evaluasi Kinerja Badan Penjaminan Mutu Internal dalam Mendukung Standarisasi Pendidikan Tinggi di Universitas Galuh. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 10(2), 259-266.

²⁸ Putra, M. G. L., Renaldi, M., & Natasia, S. R. (2021). Evaluasi dan Redesign Website Pendidikan Tinggi dengan Menerapkan User Experience Lifecycle. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 419-428.

²⁹ Darmadji, A. (2011). Urgensi Ranah Afektif Dalam Evaluasi Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi. *Unisia*, 181-192.

Efektivitas LLDIKTI Wilayah VII dapat dikatakan memiliki efektivitas yang baik dalam melakukan pembentukan satgas PPKPT karena banyaknya strategi yang dilakukan dalam percepatan pembentukan satgas PPKPT, lalu terdapat juga indikator Efisiensi yang dimana LLDIKTI Wilayah VII berhasil memanfaatkan sumber daya yang ada dalam melakukan percepatan pembentukan satgas PPKPT dengan baik, selain efisiensi juga terdapat indikator kepuasan yang dikatakan sangat baik dalam melakukan tindakan pelayanan kepada setiap perguruan tinggi yang ada dalam naungan LLDIKTI Wilayah VII, serta juga terdapat indikator kualitas dan dampak yang masing masing indikator tersebut juga terdapat respon positif dari perguruan tinggi, namun dalam hal dampak yang dihasilkan sebaiknya LLDIKTI Wilayah VII dapat lebih berkontribusi lebih dan terus mengoptimalkan kinerja pada perguruan tinggi negeri, dikarenakan pada perguruan tinggi negeri dampak yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah VII hanya dalam hal administratif saja.³⁰

D. KESIMPULAN

Dari seluruh rangkaian pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja LLDIKTI Wilayah VII dalam pembentukan satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan satgas PPKPT sangat penting dan wajib untuk dilakukan yang sesuai dengan amanat Permendikbudristek No 55 Tahun 2024. Selain itu dalam hal evaluasi kinerja yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII dengan pendekatan teori oleh Joseph Wholey (1979) dengan indikator efektivitas, efisiensi, kualitas, kepuasan, dan dampak maka evaluasi kinerja yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII dapat dikatakan telah memeneuhi target pembentukan dengan mayoritas satgas PPKPT yang telah terbentuk mencapai 85% (Sumber LLDIKTI Wilayah VII 2024) sehingga dapat disimpulkan bahwa LLDIKTI Wilayah VII memiliki kinerja yang baik dalam membentuk satgas PPKPT dengan berbagai strategi yang telah dilakukan sebagai bentuk percepatan pembentukan satgas PPKPT.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2021). Dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi 3. Bumi aksara.
- Azis, A. (2016). Penerapan Logic Model Pada Evaluasi Program Pembelajaran Inovasi Pendidikan. *Aricis*, 1, 57–67.
- Butarbutar, V. M. D., & Ismanto, B. (2022). Evaluasi Pemasaran Jasa Pendidikan Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Perguruan Tinggi. *Mimbar Ilmu*, 27(3), 485-492.

³⁰ Yulisma, L., Sukri, S., Aida, D. N., Rosmaladewi, O., & Hanafiah, N. (2023). Evaluasi Kinerja Badan Penjaminan Mutu Internal dalam Mendukung Standarisasi Pendidikan Tinggi di Universitas Galuh. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 10(2), 259-266.

- Darmadji, A. (2011). Urgensi Ranah Afektif Dalam Evaluasi Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi. *Unisia*, 181-192.
- Darmadji, A. (2014). Ranah Afektif Dalam Evaluasi Pendidikan Agama Islam, Penting Tapi Sering Terabaikan. *El-Tarbawi*, 8(1), 13-25.
- Dwi Eriyanti, L. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hamed, A. B., & Anshori, M. I. (2022). Studi Komparasi Perilaku Kreatif Mahasiswa Menghadapi Dunia Kerja (Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen FEB di UTM). *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (JKIM)*, 2(1), 110–115. <https://doi.org/10.21107/jkim.v2i1.15520>
- Hasanah, H. (2017). Teknik - Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Iriawan, H. (2024). *Teori Kebijakan Publik* (Z. R. Bahar (ed.)). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Lestari, S. P., Mas'ud Said, M., & Supriyanto, D. (2023). EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ODGJ DAN PENANGANAN DISABILITAS (Studi Kasus pada Dinas Sosial Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*, 17(13), 1–12.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Martono, S. (2021). Evaluasi Mutu Layanan Pendidikan Tinggi (Studi Pada Program Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana). *Jurnal: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan* ISSN.
- Patentius. (2022). Pengaruh Komunikasi, Penjadwalan, dan Kejelasan Job Description Terhadap Efisiensi Kerja Karyawan Pada PT. Dimas Star. *Emabi:Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1, 265–273.
- Putra, M. G. L., Renaldi, M., & Natasia, S. R. (2021). Evaluasi dan Redesign Website Pendidikan Tinggi dengan Menerapkan User Experience Lifecycle. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 419-428.
- Raharjo, S. B. (2012). Evaluasi trend kualitas pendidikan di indonesia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 511-532.
- Rifky, S. (2024). Dampak penggunaan artificial intelligence bagi pendidikan tinggi. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 2(1), 37-42.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

- Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Srinwijaya Community Services*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>
- Saputra. (2025). Strategi Kampanye Karya Magang Kinarya Dalam Meningkatkan Kesadaran Perguruan Tinggi Pada Isu Kekerasaan Seksual. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 05(03), 1–23.
- Septiani, R. A. D., & Wardana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda*, V(2), 130–137. <https://doi.org/10.37150/perseda.v5i2.1708>
- Sitorus, H. M. (2020). Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Dairi Performance Evaluation of the One Stop Integrated Services at the Investment and L. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 98–106.
- Sutariah, F. (2017). Evaluasi Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pendidikan Lembaga Pendidikan Tinggi ABC di Cikarang. *STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi)*, 2(1), 38-47.
- Siregar, F. G., Saefullah, A., Candra, H., Fadli, A., & Pardian, R. (2024). Evaluasi Penerapan ISAK 35 Terhadap Laporan Keuangan Di Pendidikan Tinggi: Studi Kasus STIE Ganesha. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3067-3079.
- Toriqularif, M. (2019). Penelitian evaluasi pendidikan. *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 66-76.
- Trivaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Nuansa Informatika*, 16(1), 33–40. <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>
- Wholey, J. S. (1979). *Evaluation: Promise and Performance*. Washington, D.C.: The Urban Institute.
- Wijaya, C. A. (2018). Sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan program studi di institusi pendidikan tinggi. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(1), 13-24.
- Yulisma, L., Sukri, S., Aida, D. N., Rosmaladewi, O., & Hanafiah, N. (2023). Evaluasi Kinerja Badan Penjaminan Mutu Internal dalam Mendukung Standarisasi Pendidikan Tinggi di Universitas Galuh. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 10(2), 259-266.
- Yulisma, L., Sukri, S., Aida, D. N., Rosmaladewi, O., & Hanafiah, N. (2023). Evaluasi Kinerja Badan Penjaminan Mutu Internal dalam Mendukung Standarisasi Pendidikan Tinggi di Universitas Galuh. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 10(2), 259-266.
- Yusuf, A. M. (2017). *Asesmen dan evaluasi pendidikan*. Prenada Media.